



LKjIP 2024  
**LAPORAN KINERJA**  
**INSTANSI PEMERINTAH**

## Kata Pengantar

Puji syukur dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar Tahun 2024. Laporan ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan dikaitkan dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Semoga laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah ini dapat bermanfaat.

Denpasar, 10 Februari 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kota Denpasar



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680924 199303 1 010

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>I PENDAHULUAN</b>	
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	2
I.3. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama .....	6
I.4. Landasan Hukum .....	6
I.5. Sistematika Penyajian .....	7
<b>II PERENCANAAN KINERJA</b>	
II.1. Visi .....	8
II.2. Misi .....	8
II.3. Tujuan dan Sasaran .....	9
II.4. Penjabaran dari Tujuan, Sasaran dan Program .....	10
II.5. Perjanjian Kinerja .....	11
<b>III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
III.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	13
III.2. Realisasi Anggaran .....	29
<b>IV PENUTUP</b>	
IV.1. Simpulan .....	34
IV.2. Saran .....	34
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Badan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok "Mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan", mendukung misi Walikota Denpasar Ke 3 yaitu peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*). Untuk mewujudkan misi tersebut ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai, yaitu: (1) Meningkatnya sumber – sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah; yang ditopang dengan Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pajak Daerah. Selanjutnya Tujuan dimaksud dijabarkan kedalam Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu: (1) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah; dan dengan Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah. Hasil analisis pencapaian kinerja Tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yang tertuang ke dalam dokumen Penetapan Kinerja yaitu:

1. Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp.1.331.387.264.594 terealisasi sebesar Rp 1.643.621.163.062,75 atau 123,46%.

Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar 47,18% terealisasi sebesar 52,67% atau 111,64%.

2. Dan atas dukungan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah ditargetkan sebesar 91% terealisasi sebesar 92,05% atau 101,15% menjadi salah satu dukungan untuk peningkatan kinerja.

Dari capaian diatas menunjukkan bahwa secara umum Badan Pendapatan Daerah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan misi kota Denpasar. Untuk pencapaian kinerja yang diinginkan, didukung anggaran belanja yang bersumber dari APBD Kota Denpasar Rp. 60.279.324.645 atau 85,85%.

## **I.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Mempunyai struktur Organisasi sebagai berikut :

Susunan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar :

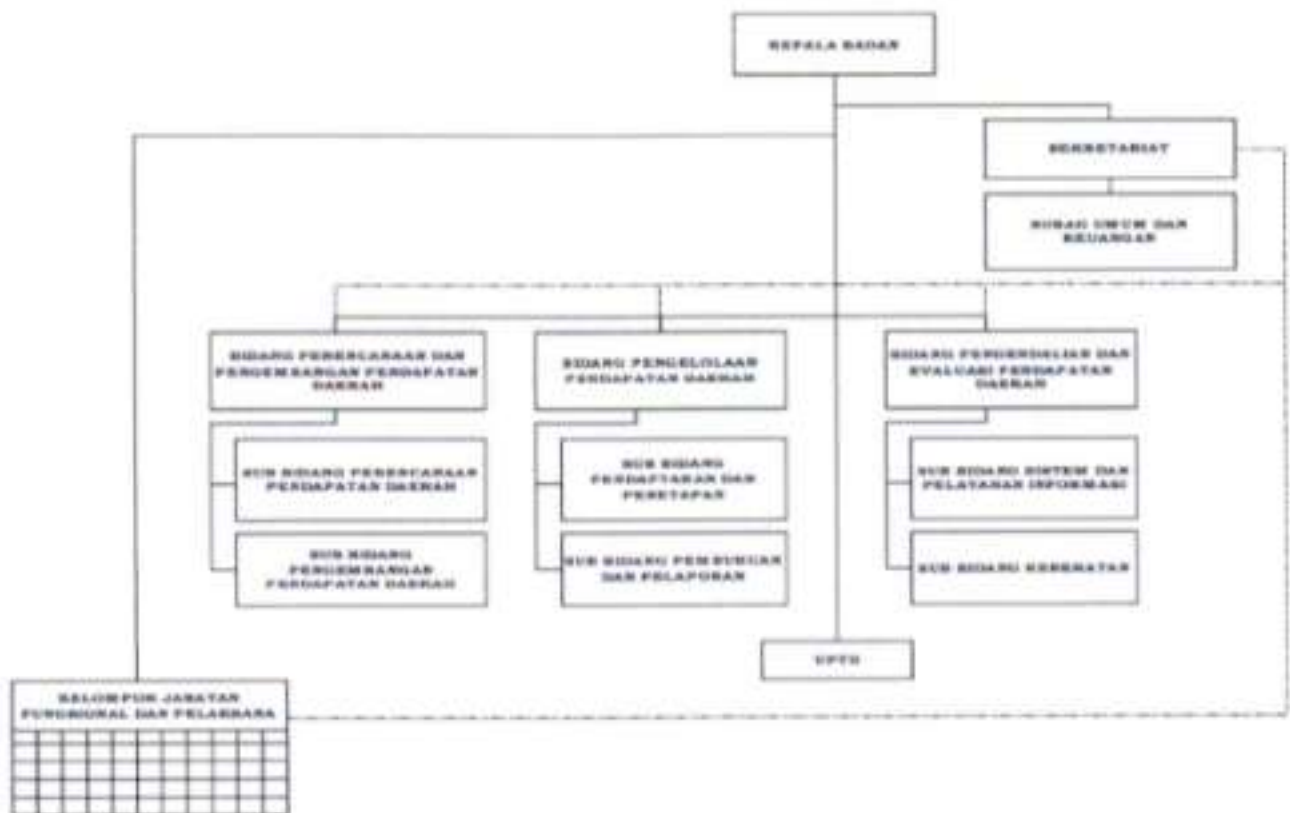
1. Kepala Badan
  - a. Jabatan Fungsional Perencana
  - b. Jabatan Fungsional Arsiparis
  - c. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Penagihan dan Penindakan
2. Sekretaris
  - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
  - a. Sub Bidang Perencanaan Patda
  - b. Sub Bidang Pengembangan Patda
4. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
  - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan
  - b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
  - a. Sub Bidang Sistem dan Pelayanan Informasi
  - b. Sub Bidang Keberatan

6. UPT Pengelolaan Pajak Daerah
  - a. Ka.UPT Pengelolaan Pajak Daerah
  - b. Ka.Sub.Bag Tata Usaha Pengelolaan Pajak Daerah

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagaimana Bagan Struktur , sebagai berikut :

**Gambar 1.1**

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH**



1

**Tabel 1.1**  
**Kondisi Sumber Daya Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024**

Kelompok Pegawai	Jumlah
<b>Aparatur Sipil Negara (ASN)</b>	<b>65 Orang</b>
Kepala Badan	1 orang
Sekretaris Badan	1 orang
Kepala Bidang	3 orang
Kepala UPT	1 orang
Kepala Sub Bagian	2 orang
Kepala Sub Bidang	6 orang
Jabatan Fungsional	4 orang
Staf	47 orang
<b>Pegawai Non ASN</b>	<b>138 Orang</b>
Tenaga Harian Lepas (THL)	8 orang
Tenaga Kontrak	130 Orang

NB : data Per 31 Desember 2024.

Berdasarkan Golongan ASN Bapenda Kota Denpasar memiliki golongan II sebanyak 7 Orang, golongan III sebanyak 49 Orang dan golongan IV sebanyak 6 orang, PPPK golongan IX sebanyak 2 orang serta pegawai Non ASN sebanyak 146 orang yang terdiri dari 9 orang Tenaga Harian Lepas (THL) dan 137 orang tenaga kontrak.

**Tabel 1.2**  
**Kondisi SDM Bapenda Kota Denpasar Berdasarkan Golongan**

NO	GOLONGAN	JUMLAH (Orang)	PERSENTASE
	<b>ASN</b>		
1	Golongan II	7	10,77%
2	Golongan III	50	76,92%
3	Golongan IV	6	9,23%
4	PPPK IX	2	3,08%
	<b>TOTAL</b>	<b>65</b>	<b>100%</b>

NON ASN			
1	THL	8	5,80%
2	Tenaga Kontrak	130	94,20%
TOTAL		138	100 %

NB : data Per 31 Desember 2024

Berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki ASN di lingkungan Bapenda Kota Denpasar yang memiliki pendidikan Doktor (S3) sebanyak 1 Orang, Magister (S2) sebanyak 9 orang, Sarjana (S1) sebanyak 43 orang, SMA sebanyak 12 orang.

**Tabel 1.3**  
**Kondisi SDM Bapenda Kota Denpasar**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	BERDASARKAN PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)	PERSENTASE
ASN			
1	S3	1	1,54%
2	S2	9	13,85%
3	S1	43	66,15%
4	SMA	12	18,46%
TOTAL		65	100%

NB : data Per 31 Desember 2024.

Berdasarkan jenis kelamin dari total 69 orang ASN di lingkungan Bapenda Kota Denpasar mayoritas berjenis kelamin laki – laki yaitu sebanyak 43 orang sisanya sebanyak 22 orang berjenis kelamin perempuan sedangkan untuk 138 orang Tenaga Non ASN jumlah pegawai yang berjenis kelamin laki – laki sebanyak 80 orang sedangkan sisa sebanyak 58 orang berjenis kelamin perempuan.

### **I.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama**

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar merupakan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota Denpasar, dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil untuk menetapkan target Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan utama dalam pembangunan Kota Denpasar sehingga menjadi sangat penting. Dengan demikian dapat dirumuskan Aspek Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagai berikut :

1. Terciptanya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang efisien dan efektif;
2. Terwujudnya Kapasitas Keuangan Daerah yang kuat dalam APBD; dan
3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar dari sektor pajak daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bapenda Kota Denpasar tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pengelolaan pendapatan maupun kinerja pelayanan. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait tentang pengendalian dan pengawasan terhadap potensi pendapatan daerah;
3. Masih rendahnya kualitas data sehingga mempengaruhi penerimaan daerah; dan
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

### **I.4 Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar Tahun 2024 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.5 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah suatu media untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar selama Tahun 2024. Capaian Kinerja Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, merupakan tolak ukur keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa datang. Artinya, terhadap capaian yang telah mencapai atau melebihi target (sudah baik) agar tetap dipertahankan, sedangkan terhadap capaian kinerja yang masih di bawah target untuk masa mendatang dapat dilakukan perbaikan melalui strategi-strategi yang lebih baik.

Dengan pola pikir seperti tersebut di atas, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 dapat diilustrasikan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1.2  
Sistematika Penyajian LKJIP



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

Peningkatkan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang mana terlihat dari penajaman program pada Renstra 2016–2021. Dengan merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis.

### II.1 Visi

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan visi Pemerintahan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah

**“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN “**

### II.2 Misi

Badan Pendapatan Daerah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu pada misi 3 pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021 yaitu “Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*)”. Untuk mewujudkan misi tersebut maka program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

## II.3 Tujuan dan Sasaran

### II.3.1 Tujuan

Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Pemerintahan Kota Denpasar, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Dalam mewujudkan misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar menetapkan tujuan, yaitu :

1. Meningkatnya Sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
2. Dan dukungan atas Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah yang didasarkan pada pengukuran jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah berupa persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah.

### II.3.2 Sasaran

Mengacu pada tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu dari tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Sasaran Strategis Jangka Menengah**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	33%	35%	35,94%	40,12%	40,25%
			Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rp. 654920213494,58	Rp. 657.068.247.898	Rp. 764.495.670.000	Rp. 855.153.180.000	Rp. 876.276.190.000

Dengan ditetapkannya sasaran strategis dari tahun 2020-2024 seperti tertera pada tabel diatas maka untuk mewujudkan tujuan Bapenda yakni meningkatnya sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah maka ditetapkan persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah sebagai indikator kinerja dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai penunjang data di setiap target tiap tahunnya.

#### II.4 Penjabaran dari Tujuan, Sasaran dan Program

Badan Pendapatan Daerah memiliki tujuan meningkatkan sumber-sumber penerimaan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dengan sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditopang oleh 2 (dua) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran dan Program**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	40,25%
			Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		Rp. 876.276.190.000

#### Program

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 55.835.232.880 |
| 2. Pengelolaan Pendapatan Daerah                     | Rp. 3.920.441.000  |

Berdasarkan tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan maka dapat dilihat pada tabel 2.2 di tahun 2024 ditetapkan target sebesar 40,25% atau dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 876.276.190.000,00.

## II.5 Perjanjian Kinerja

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran program dan kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran program dan kegiatan, di tahun 2024 disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran program, kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dengan Walikota Denpasar tanggal 3 Januari 2024 dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang diuraikan dalam tabel 2.3

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**  
**Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	876.276.190.000
	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	40,25%

Berdasarkan tabel 2.3 diatas menampilkan sasaran strategis dan indikator kinerja Badan Pendapatan Darah Kota Denpasar dengan satuan (dalam juta rupiah) pada indikator jumlah penerimaan PAD sebesar Rp 876.276.190.000,- dan indikator kinerja kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan satuan persentase sebesar 40,25%.

Dengan masa pasca pandemi yang diimbangi terhadap pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat menyebabkan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dengan pengaruhnya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka dilakukan pergeseran Anggaran untuk membiayai program dan kegiatan strategis dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sehingga berpengaruh terhadap perjanjian kinerja yang sudah ditetapkan. Maka dari itu dilakukanlah perubahan perjanjian kinerja 2024 pada tanggal 19 Agustus 2024 yang diuraikan dalam Tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**  
**Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Rp. 1.331.387.264.594
	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	47,18%

#### Program

1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp. 52.213.807.695
2. Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp. 8.065.516.950

Dari penjabaran tabel 2.4 diatas ditetapkan target perubahan perjanjian kinerja tahun 2024 dengan indikator kinerja jumlah penerimaan PAD sebesar Rp. 1.331.387.264.594 dan indikator kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 47,18%. Hal tersebut menunjukkan adanya penyesuaian dengan kondisi terkini yang dimana jumlah penerimaan pendapatan mengalami peningkatan.

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja pemberi amanah. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar melaksanakan kewajiban untuk menyajikan Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 adalah laporan kinerja yang memuat pertanggung jawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 dalam mencapai tujuan dan sasaran dan merupakan penyusunan LKjIP yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Denpasar 2016-2021 dan Rencana Strategis Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2021. Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja sasaran.

### III.1 Capaian Kinerja Organisasi

#### III.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar berpedoman pada pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017.

Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja yang paling utama (IKU). Capaian Indikator Kinerja

Utama diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju.			
MISI 3: Kejujuran dan Spirit Sewakadarma Sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ( <i>Good Governance</i> ).			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Mengoptimalkan Potensi PAD	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi</li><li>2. Peningkatan Kualitas Data Wajib Pajak</li><li>3. Meningkatkan Koordinasi Dengan Instansi Terkait</li><li>4. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber – Sumber Potensi Pendapatan Daerah</li></ol>

### III.1.2 IKU Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dengan Misi, Sasaran dan Indikator Kinerja RPJMD Kota Denpasar

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar mengacu pada misi 3 RPJMD Kota Denpasar (Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Adapun keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

**Tabel 3.2**

MISI 3 :	URAIAN	RPJMD	RENSTRA
Kejujuran dan Spirit Sewaka Dharma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Tujuan	Meningkatkan Pendapatan Daerah	Mengoptimalkan potensi PAD
	Sasaran	Meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya PAD
	IKU	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	- Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah - Jumlah Penerimaan PAD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar tentu tidak terlepas dari permasalahan - permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pengelolaan pendapatan maupun kinerja pelayanan. Adapun permasalahan – permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait tentang pengendalian dan pengawasan terhadap potensi Pendapatan Daerah.
3. Masih rendahnya kualitas data sehingga mempengaruhi penerimaan daerah.
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Capaian kinerja tahun 2024 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Capaian kinerja dapat dilihat dari Pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap capaian Indikator Kinerja, dimana target kinerja yang sudah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja dibandingkan dengan realisasi kinerja yang telah dicapai tahun 2024.

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar telah merumuskan sasaran strategis dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan kinerja sasaran strategis pendukungnya. Capaian sasaran strategis diindikasikan dengan capaian Indikator Kinerja yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi dan membandingkan dengan targetnya.

**Tabel. 3.3**  
**Tabel Perbandingan Capaian Kinerja**

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja										
No. Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja		2023				2024				
		Target	Target Perubahan	Realisasi	%Capaian	Target	Target Perubahan	Realisasi	%Capaian	
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	40,12%	43,65%	48,14%	110,30%	40,25%	47,18%	52,67%	111,64%
	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rp. 855.153.180.000	Rp. 1.019.923.808.070	Rp. 1.198.372.000.165,54	117,50%	Rp. 876.276.190.000	Rp. 1.331.387.264.594	Rp. 1.643.621.163.062,75		123,46%

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 yang ditetapkan sebesar **Rp.1.331.387.264.594** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp.1.643.621.163.062,75** dengan capaian kinerja sasaran yang diperoleh sebesar **123,46 %**, yang terdiri :

1. Pajak Daerah dengan realisasi sebesar	Rp. 1.395.584.137.168,51
2. Retribusi Daerah dengan realisasi sebesar	Rp. 22.486.748.295
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan realisasi sebesar	Rp. 75.729.806.844,40
4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan realisasi sebesar	Rp. 149.820.470.754,84

Apabila Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 1.643.621.163.062,75 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 1.198.372.000.165,54 Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 445.249.162.897,21 atau 37,15% dari Tahun 2023.

Komposisi jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dapat digambarkan dalam Grafik 3.1



**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa Tahun terakhir**

Sasaran Strategis	Indikator	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	33%	35%	35,94%	40,12%	40,25%	37,62%	40,28%	42,16%	48,14%	52,67%
	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rp. 654.920.213.494,58	Rp. 657.088.247.868	Rp. 764.495.670.000	Rp. 855.153.380.000	Rp. 876.276.390.000	Rp. 731.261.280.905,53	Rp. 795.947.093.834,92	Rp. 888.025.219.497,36	Rp. 1.198.372.000.165,54	Rp. 1.643.621.163.062,75

Dilihat dari komposisi persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari target tahun 2020 sebesar 33% dengan realisasi sebesar 37,62%, dilanjutkan di target tahun 2021 35% dengan realisasi 40,28%, target tahun 2022 35,94% terealisasi sebesar 42,16%, kemudian target tahun 2023 40,12% realisasi sebesar 48,14% dan target di tahun 2024 sebesar 40,25% terealisasi 52,67%.

**Tabel 3.5**  
**Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024**

PAD	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024
Pajak Daerah	489.692.369.902,61	521.849.341.929,64	690.247.999.670,16	967.587.501.944,79	1.395.584.137.168,51
Retribusi Daerah	29.183.790.708,00	23.552.907.074,00	19.995.242.813	21.741.996.411	22.486.748.295
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	56.572.597.030,60	53.948.291.794,20	43.605.949.688,72	56.049.387.890,89	75.729.806.844,40
Lain-lain PAD yang Sah	155.812.523.264,32	196.596.553.037,08	134.176.027.324,48	152.993.113.918,86	149.820.470.754,84
<b>Jumlah Penerimaan PAD</b>	<b>731.261.280.905,53</b>	<b>795.947.093.834,92</b>	<b>888.025.219.497,36</b>	<b>1.198.372.000.165,54</b>	<b>1.643.621.163.062,75</b>

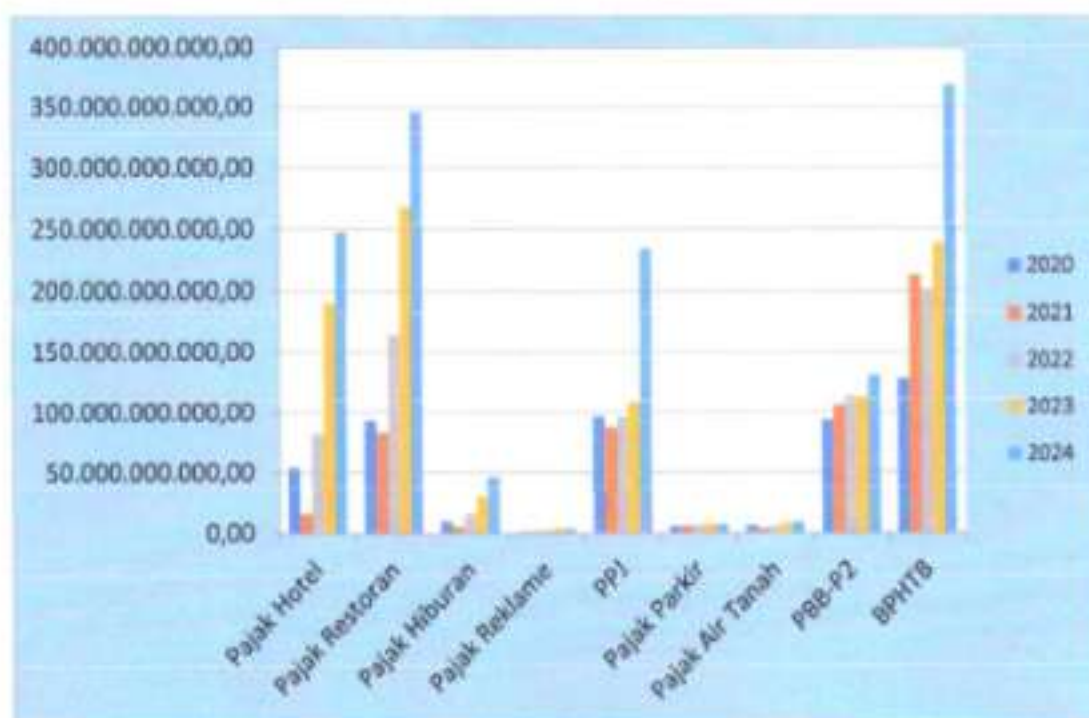
Dilihat dari komposisi Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah menempati posisi tertinggi disusul dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang sah dan Retribusi Daerah. Adapun penerimaan Pendapatan dari sektor Pajak Daerah terdiri dari :

1. Pajak Hotel dengan realisasi sebesar	Rp.	247.585.835.065,12
2. Pajak Restoran dengan realisasi sebesar	Rp.	346.419.958.151,07
3. Pajak Hiburan dengan realisasi sebesar	Rp.	46.728.695.078,69
4. Pajak Reklame dengan realisasi sebesar	Rp.	4.327.899.436,63
5. Pajak Penerangan Jalan dengan realisasi sebesar	Rp.	234.622.379.925
6. Pajak Parkir dengan realisasi sebesar	Rp.	6.982.216.990
7. Pajak Air Tanah dengan realisasi sebesar	Rp.	9.183.345.618
8. Pajak Bumi dan Bangunan dengan realisasi sebesar	Rp.	131.067.019.803
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan realisasi sebesar	Rp.	368.666.787.101

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Pajak Daerah**  
**Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024**

PAJAK DAERAH	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024
Pajak Hotel	54.218.559.520,58	16.060.784.468,39	82.367.382.710,04	190.101.438.505,83	247.585.835.065,12
Pajak Restoran	93.202.955.815,85	63.211.179.126,88	164.305.556.851,37	268.048.400.338,40	346.419.958.151,07
Pajak Hiburan	9.851.415.929,86	5.451.725.774,87	16.140.441.402,45	30.083.002.934,62	46.728.695.078,69
Pajak Reklame	1.298.703.432,34	1.577.113.603,50	3.119.622.242,30	4.361.511.109,94	4.327.899.436,63
PPJ	96.917.837.846,00	87.445.313.141,00	96.019.513.737,00	108.472.831.563,00	234.622.379.925
Pajak Parkir	6.021.814.507,00	5.683.724.645,00	6.860.767.280,00	7.581.448.580,00	6.982.216.990
Pajak Air Tanah	6.526.130.535,00	3.996.066.532,00	6.342.002.090,00	8.635.816.993,00	9.183.345.618
PBBP2	93.815.354.409,00	105.617.385.655,00	113.413.783.878,00	111.576.884.592,00	131.067.019.803
BPHTB	127.839.697.907,00	212.806.048.983,00	201.678.929.479,00	238.726.167.328,00	368.666.787.101
<b>Total Pajak Daerah</b>	<b>489.692.369.902,61</b>	<b>521.849.341.929,64</b>	<b>690.247.999.670,16</b>	<b>967.587.501.944,79</b>	<b>1.395.584.137.188,51</b>

**Grafik 3.2**  
**Grafik Pertumbuhan Pajak Daerah**



**Tabel 3.7**  
**Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir Tahun	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	52,67%	47,18%	111,64
		Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1.643.621.163.062,75	1.331.387.264.594,00	123,46

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2024 ditetapkan sebesar **52,67%** dengan perhitungan :

$$\frac{\text{Realisasi Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Data :

- Realisasi Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024  
Rp. 1.643.621.163.062,75
- Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 3.120.981.664.143,75

dari data diatas maka dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\frac{1.643.621.163.062,75}{3.120.981.664.143,75} \times 100 = \underline{52,67\%}$$

Capaian Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Tahun 2024 :

$$\frac{\text{Target Kontribusi PAD terhadap Pendapatan}}{\text{Realisasi Kontribusi PAD terhadap Pendapatan}} \times 100$$

Perhitungan :

$$\frac{52,67}{47,18} \times 100 = \underline{111,64\%}$$

Dari perhitungan diatas maka dapat disimpulkan Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2024 yang ditargetkan sebesar **47,18%** dapat direalisasikan sebesar **52,67%** atau 111,64% dari target yang ditetapkan. Apabila Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2024 sebesar **52,67%** dibandingkan dengan kontribusi PAD Tahun 2023 sebesar **48,14%** Kontribusi PAD Tahun 2024 mengalami Peningkatan sebesar **4,53%** atau sebesar **9,41%** dari Tahun 2023 Peningkatan tersebut dapat dilihat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

**Peningkatan/Penurunan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah  
Tahun 2023 dan Tahun 2024**

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023	TAHUN 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	48,14%	52,67%	4,53%	9,41%

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, menggambarkan seberapa besar peran PAD dalam total Penerimaan Pendapatan Daerah. Semakin besar kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap Pendapatan Daerah berarti semakin kecil ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Peningkatan PAD mutlak harus dilakukan agar mampu membiayai kebutuhan sendiri sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan akhirnya dapat mandiri.

Tabel 3.9

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan  
Standar Kabupaten Badung**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Provinsi Bal	Standar Kabupaten Badung	%Capaian dengan Provinsi Bal $A=4,5 \times 100$	%Capaian dengan Kabupaten Badung $B=4,5 \times 100$
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kontribusi PAD terhadap	52,67%	70,76%	88,23%	74,43%	59,70%
		Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1.843.821.163.062,75	5.539.947.824.162,60	7.507.176.347.846,51	29,57%	21,89%

Sumber Data: Laporan PAD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 dan Laporan PAD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024.

Berdasarkan Tabel 3.9 perbandingan realisasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali terkait kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2024 sudah baik dengan Standar Provinsi dan Standar Kabupaten Badung berdasarkan realisasi di Tahun 2024.

**Tabel 3.10**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi							
No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	47,18%	52,67%	111,64%	211,96%	Untuk lebih ditingkatkan kembali
		Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1.331.387.264.594	1.643.621.163.062,75	123,46%	312.233.898.468,75	Untuk lebih ditingkatkan kembali

Berdasarkan Tabel 3.9 diatas analisis keberhasilan, kegagalan serta solusi dapat dilihat bahwa tingkat keberhasilan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 211,96% dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 312.233.898.468,75 yang menunjukkan tingkat keberhasilan serta solusi yang dilakukan tetap untuk lebih ditingkatkan kembali.

**Tabel 3.11**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian%	Anggaran	Realisasi	Capaian%	
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	47,18%	52,67%	111,64%	60.279.324.645	51.750.539.239	85,85	99,00

Analisa terhadap tabel 3.10 diatas yakni penggunaan anggaran yang telah efisien dengan hasil perhitungan efisiensi sebesar 99%, jumlah anggaran sebesar Rp 60.279.324.645 dan realisasi Rp 51.750.539.239 serta persentase capaian 85,85%.

Adapun dalam proses penerimaan Pendapatan dalam sektor Pajak Daerah Tahun 2024 dilakukan pengembangan inovasi yang salah satunya menjadi faktor pendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah. Inovasi-inovasi tersebut dijabarkan pada tabel dibawah ini:



**Tabel 3.12**  
**Inovasi – inovasi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024**



No.	Inovasi	Keterangan	Sudah / Belum Dilaksanakan	Bukti Dukung
1	Pagi Denpasar	Aplikasi Mobile yang diluncurkan Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagai aplikasi On Boarding Pelayanan Pajak Daerah	Sudah	
2	Gen Dental	Program yang menyasar kaum milenial pelajar Kota Denpasar dengan tujuan untuk penggunaan pembayaran secara digital baik di kantin sekolah, pembayaran SPP dan pembayaran lainnya	Sudah	
3	Reditia (Renon Digital Area)	Inovasi Reditia mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah	Sudah	
4	Melodi Sanur	Digitalisasi sektor keuangan dan optimalisasi penerimaan pajak di Kawasan wisata Sanur	Sudah	

5	Pak Ketut (Pajak Kawasan Ekonomi Teuku Umar Timur)	Klaster digital "Pak Ketut" ini merupakan pengembangan ekosistem transaksi digital untuk memperluas layanan dan meningkatkan pergerakan ekonomi serta keuangan Kota Denpasar	Sudah	
6	Lapak Ketumbar (Layanan Pajak Kawasan Ekonomi Teuku Umar Barat)	Lapak Ketumbar (Layanan Pajak Kawasan Ekonomi Teuku Umar Barat) melibatkan usaha-usaha yang ada di Kawasan tersebut	Sudah	

Dalam mendukung pelayanan dan terwujudnya inovasi-inovasi yang ada, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar telah melakukan peningkatan kualitas dari segi Sumber Daya Manusianya seperti yang tertera pada table 3.13 dibawah ini:

**Tabel 3.13**

No.	Kegiatan	Bukti Dukung
1	Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Tahap 3 TA 2024 (Kelas Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)	
2	Capacity Building tenaga pelayanan	
3	Capacity Building tenaga lapangan	

4	Pelatihan ISO Anti Penyuaan	
5	Pelatihan kepribadian tenaga pelayanan dengan John Robert Power	

Selain inovasi dan kegiatan pendukung diadakan juga koordinasi dan evaluasi yang dilakukan setiap triwulan dalam tahun 2024 di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.

**Table 3.14**  
**Koordinasi dan Evaluasi**

No.	Koordinasi dan Evaluasi	Bukti Dukung
1	Rapat Koordinasi Triwulan I	
2	Rapat Koordinasi Triwulan II	
3	Rapat Koordinasi Triwulan III	
4	Rapat Koordinasi Triwulan IV	

## SASARAN STRATEGIS

**Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah**

## INDIKATOR KINERJA

**Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak**

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah dengan indikator Indek kepuasan masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner yang terdiri dari 9 unsur penilaian seperti :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/tarif
5. Produk Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penangan pengaduan, sarana dan masukan
9. Sarana dan prasarana

Dari survey yang dilakukan, capaian nilai indek kepuasan masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah diperoleh sebesar **92,05** capaian tersebut sudah memenuhi atas target IKM Kota Denpasar yang ditetapkan yaitu sebesar nilai **91,00** dengan persentase capaian sebesar **101,15 %** . Apabila Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023, Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar **92,05** mengalami peningkatan sebesar **1,05** atau sebesar **1,19 %** dari Tahun 2023 sebesar **88,24** adapun peningkatan tersebut dapat dilihat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.15

**Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  
Terhadap Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024**

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah	83,00	84,39	86,26	88,24	92,05

Tabel 3.16

**Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	111,64%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	85,92%	Menunjang
		Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	123,45%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi PAD	85,38%	Menunjang

Pada tabel 3.16 diatas dapat dijelaskan bahwa analisa dari keberhasilan dan kegagalan disetiap program yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dengan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dan capaian yang dihasilkan yaitu sudah menunjang, dengan uraian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota indikator kinerja persentase pemenuhan layanan kesekretariatan dengan capaian 85.92% dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah indikator kinerja persentase realisasi PAD dengan capaian 85,38%.

### III.2 Realisasi Anggaran

Untuk pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan perlu didukung oleh belanja. Untuk tahun 2024 belanja terealisasi sebesar Rp. **51.750.539.239** atau 85,85% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 60.279.324.645

Belanja langsung yang terdiri dari program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.17**  
**Target dan realisasi Program/kegiatan**  
**Tahun 2024**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	52.213807.695	44.864.216.583	85,92 %
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.168.284.731	32.081.662.746	86,31 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37.167.034.731	32.080.412.746	86,31%
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.250.000	1.250.000	100 %
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	609.520.900	542.873.912	89,07%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.046.500	14.157.100	78,45 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	246.753.000	225.331.000	91,32 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.232.000	38.033.000	87,97%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	225.627.400	207.557.400	91,99 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.280.000	14.450.400	83,63 %
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.582.000	43.345.012	73,99%

	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>6.969.998.975</b>	<b>5.327.397.600</b>	<b>76,43 %</b>
	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	6.969.998.975	5.327.397.600	76,43 %
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.275.306.089</b>	<b>5.832.892.644</b>	<b>92,95 %</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	253.830.265	229.987.875	90,61 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	611.200.000	431.944.429	70,67 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.410.275.824	5.170.960.340	95,58%
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.190.697.000</b>	<b>1.079.389.681</b>	<b>90,65 %</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	755.352.000	673.090.150	89,11%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.845.000	91.615.000	78,41 %
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	30.000.000	30.000.000	100,00%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	255.500.000	251.899.531	98,59 %
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.000.000	27.785.000	99,23 %
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	100%
<b>2.</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>8.065.516.950</b>	<b>6.886.322.656</b>	<b>85,38%</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>8.065.516.950</b>	<b>6.886.322.656</b>	<b>85,38%</b>
	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1.260.947.150	1.167.319.100	92,57%
	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	2.578.422.000	2.412.721.056	93,57%

Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	526.911.500	505.000.000	95,84%
Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	3.225.000	3.150.000	97,67%
Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	2.921.073.800	2.124.370.000	72,73%
Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	774.937.500	673.762.500	86,94%
<b>Total</b>	<b>60.279.324.645</b>	<b>51.750.539.239</b>	<b>85,85%</b>

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp. 37.167.034.731,- pada anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 32.080.412.746,- atau sebesar 86,31%.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dianggarkan sebesar Rp 1.250.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 1.250.000,- atau sebesar 100%.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dianggarkan sebesar Rp. 18.046.500,- dan direalisasikan sebesar Rp. 14.157.100,- atau sebesar 78,45%.
4. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dianggarkan sebesar Rp. 246.753.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 225.331.000,- atau sebesar 91,32%.
5. Sub Kegiatan Peralatan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp. 43.232.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 38.033.000,- atau sebesar 87,97%.
6. Sub Kegiatan Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 225.627.400,- dan direalisasikan sebesar Rp. 207.557.400,- atau sebesar 91,99%.
7. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dianggarkan sebesar Rp. 17.280.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 14.450.400,- atau sebesar 83,63 %.

8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dianggarkan sebesar Rp. 58.582.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 43.345.012,- atau sebesar 73,99%.
9. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 6.969.998.975,- dan direalisasikan sebesar Rp. 5.327.397.600,- atau sebesar 76,43%.
10. Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat dianggarkan sebesar Rp. 253.830.265,- pada anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 229.987.875,- atau sebesar 90,61%.
11. Sub Kegiatan Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dianggarkan sebesar Rp. 611.200.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 431.944.429,- atau sebesar 70,67 %.
12. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dianggarkan sebesar Rp. 5.410.275.824,- pada anggaran direalisasikan sebesar Rp. 5.170.960.340,- atau sebesar 95,58%.
13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dianggarkan sebesar Rp.755.352.000,-dan direalisasikan sebesar Rp. 673.090.150,- atau sebesar 89,11%.
14. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 116.845.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 91.615.000,- atau sebesar 78,41%.
15. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Tak berwujud dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000 dan direalisasikan sebesar Rp. 30.000.000 atau sebesar 100%.
16. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 255.500.000,- dan direalisasikan sebesar Rp.251.899.531,- atau sebesar 98,59%.
17. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 28.000.000 dan direalisasikan sebesar Rp. 27.785.888,- atau sebesar 99,23%.
18. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dianggarkan sebesar

Rp. 5.000.000 dan direalisasikan sebesar Rp.5.000.000 atau sebesar 100%.

19. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.260.947.150,- dan direalisasikan sebesar Rp.1.167.319.100,- atau sebesar 92,57%.
20. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp. 2.578.422.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 2.412.721.056,- atau sebesar 93,57%.
21. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp. 526.911.500,- dan direalisasikan sebesar Rp. 505.000.000,- atau sebesar 95,84%.
22. Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp. 3.225.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 3.150.000,- atau sebesar 97,67%.
23. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp. 2.921.073.800,- dan direalisasikan sebesar Rp. 2.124.370.000,- atau sebesar 72,73%.
24. Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp. 774.937.500,- dan direalisasikan sebesar Rp. 673.762.500,- atau sebesar 86,94%.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang tersusun ini merupakan pertanggung jawaban Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2024. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah - langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa - masa mendatang.

### IV.1 Simpulan

Dari hasil analisa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar di peroleh kesimpulan:

1. Pencapaian kinerja secara umum, mencapai hasil sebagaimana ditargetkan dalam perencanaan sebelumnya.
2. Anggaran / Dana sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana diprogramkan, dalam merealisasikan kegiatan dapat dialokasikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan.

### IV.2 Saran

Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai, perlu melakukan penajaman prioritas, koordinasi dan meningkatkan kinerja kegiatan sebagai pelaksana program, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan transparan kepada masyarakat dibidang pelayanan pajak daerah serta berupaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Denpasar, 10 Februari 2025  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kota Denpasar



Dr. (r.) Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680924 199303 1 010

# LAMPIRAN

## PERJANJIAN KINERJA

### RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

OPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR  
TAHUN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN		ANGGARAN (RP)	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV		URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1.	Memingkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	45,07	45,07	45,07	45,07	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	1.097.529.476.653	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
		Jumlah Penemuan Pendapatan Asli Daerah	Rp. 109.762.947.605	Rp. 104.844.421.498	Rp. 274.407.389.163	Rp. 546.814.738.327					



Denpasar, 03 Januari 2024  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kota Denpasar

Dr. Ir. Gusti Ngurah Eddy Mulya, S.T., S.Si  
Tembesa Utama Muda  
19680924 199303 1 010

# PERJANJIAN KINERJA KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA DENPASAR**

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja ini dibuat, berdasarkan persetujuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Badan Pendapatan Daerah yang Berbasis Pajak.

Tanggal: 10 Februari 2024, Denpasar, Bali, Indonesia.

Antara: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

dan:

1. Kepala Bidang Pajak

2. Kepala Bidang Pajak

3. Kepala Bidang Pajak

4. Kepala Bidang Pajak

5. Kepala Bidang Pajak

6. Kepala Bidang Pajak

*[Signature]*  
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

*[Signature]*  
Kepala Bidang Pajak

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR

No	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Kelembagaan	Kelembagaan	100%
2	Kelembagaan	Kelembagaan	100%
3	Kelembagaan	Kelembagaan	100%
4	Kelembagaan	Kelembagaan	100%
5	Kelembagaan	Kelembagaan	100%
6	Kelembagaan	Kelembagaan	100%
7	Kelembagaan	Kelembagaan	100%
8	Kelembagaan	Kelembagaan	100%
9	Kelembagaan	Kelembagaan	100%
10	Kelembagaan	Kelembagaan	100%

Program	Anggaran	Subsidi
1. Program Pengadaan Barang/Jasa	Rp 1.000.000.000	
2. Program Pengadaan Barang/Jasa	Rp 1.000.000.000	
3. Program Pengadaan Barang/Jasa	Rp 1.000.000.000	
4. Program Pengadaan Barang/Jasa	Rp 1.000.000.000	
5. Program Pengadaan Barang/Jasa	Rp 1.000.000.000	
6. Program Pengadaan Barang/Jasa	Rp 1.000.000.000	
7. Program Pengadaan Barang/Jasa	Rp 1.000.000.000	
8. Program Pengadaan Barang/Jasa	Rp 1.000.000.000	
9. Program Pengadaan Barang/Jasa	Rp 1.000.000.000	
10. Program Pengadaan Barang/Jasa	Rp 1.000.000.000	

*[Signature]*  
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

*[Signature]*  
Kepala Bidang Pajak

# PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA DENPASAR**

## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perubahan Perjanjian Kinerja ini dibuat, berdasarkan persetujuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Badan Pendapatan Daerah yang Berbasis Pajak.

Tanggal: 10 Februari 2024, Denpasar, Bali, Indonesia.

Antara: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

dan:

1. Kepala Bidang Pajak

2. Kepala Bidang Pajak

3. Kepala Bidang Pajak

4. Kepala Bidang Pajak

5. Kepala Bidang Pajak

*[Signature]*  
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

*[Signature]*  
Kepala Bidang Pajak

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR

No	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Kelembagaan	Kelembagaan	100%
2	Kelembagaan	Kelembagaan	100%
3	Kelembagaan	Kelembagaan	100%
4	Kelembagaan	Kelembagaan	100%
5	Kelembagaan	Kelembagaan	100%
6	Kelembagaan	Kelembagaan	100%
7	Kelembagaan	Kelembagaan	100%
8	Kelembagaan	Kelembagaan	100%
9	Kelembagaan	Kelembagaan	100%
10	Kelembagaan	Kelembagaan	100%

Program	Anggaran	Subsidi
1. Program Pengadaan Barang/Jasa	Rp 1.000.000.000	
2. Program Pengadaan Barang/Jasa	Rp 1.000.000.000	
3. Program Pengadaan Barang/Jasa	Rp 1.000.000.000	
4. Program Pengadaan Barang/Jasa	Rp 1.000.000.000	
5. Program Pengadaan Barang/Jasa	Rp 1.000.000.000	
6. Program Pengadaan Barang/Jasa	Rp 1.000.000.000	
7. Program Pengadaan Barang/Jasa	Rp 1.000.000.000	
8. Program Pengadaan Barang/Jasa	Rp 1.000.000.000	
9. Program Pengadaan Barang/Jasa	Rp 1.000.000.000	
10. Program Pengadaan Barang/Jasa	Rp 1.000.000.000	

*[Signature]*  
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

*[Signature]*  
Kepala Bidang Pajak

# IKU TAHUN 2024

## Triwulan I

### PENGUKURAN ENERGI

DPO : Badan Pendapatan Daerah  
Tahun : Triwulan I Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Perentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	45,27%	47,27%	104,88%
	Jumlah Persewaan Perumahan Perumahan Asli Daerah	Rp	Rp	100,00%
		Rp 329.762.942.827,23	Rp 329.762.942.827,23	

Jumlah seluruh Anggaran Regulasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Rp 33.750.473.840

Jumlah Realisasi Anggaran Regulasi Tahun 2024 Rp 8.980.001.360

Denpasar, 25 April 2024  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kota Denpasar  
  
**Dwi L. Sant. Niswah Eddy Mulya, S.Pd, M.Si**  
Widyaiswara Utama  
NIP. 19680524 200303 1 001

### Perhitungan Perolehan Kinerja Triwulan I Tahun 2024

Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja : Perentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

TARGET 45,27%  
Realisasi Jumlah Persewaan Perumahan Asli Daerah Rp 329.762.942.827,23  
Realisasi Pendapatan Daerah Rp 607.821.472.363,23

Perhitungan

$\frac{\text{Realisasi Jumlah Persewaan Perumahan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$

$\frac{329.762.942.827,23}{607.821.472.363,23} \times 100 = 47,27\%$

Capaian Persewaan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan

$\frac{\text{Realisasi Kontribusi PAD terhadap Pendapatan}}{\text{Target Kontribusi PAD terhadap Pendapatan}} \times 100$

$\frac{47,27}{45,27} \times 100 = 104,88\%$

Indikator Kinerja : Jumlah Persewaan Perumahan Asli Daerah

TARGET Rp 329.762.942.840  
Realisasi Rp 329.762.942.827,23

Perhitungan

$\frac{\text{Realisasi Jumlah Persewaan Perumahan Asli Daerah}}{\text{Target Jumlah Persewaan Perumahan Asli Daerah}} \times 100$

$\frac{329.762.942.827,23}{329.762.942.840} \times 100 = 100,43\%$

## Triwulan II

### PENGUKURAN ENERGI

DPO : Badan Pendapatan Daerah  
Tahun : Triwulan II Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Perentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	45,27%	50,50%	111,27%
	Jumlah Persewaan Perumahan Perumahan Asli Daerah	Rp 344.644.421.498	Rp 712.708.448.971,06	412,89%

Jumlah seluruh Anggaran Regulasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Rp 33.750.473.840

Jumlah Realisasi Anggaran Regulasi Tahun 2024 Rp 13.471.458.224

Denpasar, 27 Juli 2024  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kota Denpasar  
  
**Dwi L. Sant. Niswah Eddy Mulya, S.Pd, M.Si**  
Widyaiswara Utama  
NIP. 19680524 200303 1 001

### Perhitungan Perolehan Kinerja Triwulan II Tahun 2024

Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja : Perentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

TARGET 45,27%  
Realisasi Jumlah Persewaan Perumahan Asli Daerah Rp 712.708.448.971,06  
Realisasi Pendapatan Daerah Rp 1.412.371.399.683,06

Perhitungan

$\frac{\text{Realisasi Jumlah Persewaan Perumahan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$

$\frac{712.708.448.971,06}{1.412.371.399.683,06} \times 100 = 50,50\%$

Capaian Persewaan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan

$\frac{\text{Realisasi Kontribusi PAD terhadap Pendapatan}}{\text{Target Kontribusi PAD terhadap Pendapatan}} \times 100$

$\frac{50,50}{45,27} \times 100 = 112,89\%$

Indikator Kinerja : Jumlah Persewaan Perumahan Asli Daerah

TARGET Rp 344.644.421.498  
Realisasi Rp 712.708.448.971,06

Perhitungan

$\frac{\text{Realisasi Jumlah Persewaan Perumahan Asli Daerah}}{\text{Target Jumlah Persewaan Perumahan Asli Daerah}} \times 100$

$\frac{712.708.448.971,06}{344.644.421.498} \times 100 = 412,89\%$

## Triwulan III

### REKAPITULASI KINERJA

OPD : Badan Pendapatan Daerah  
Tahun : Triwulan III Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	45,0%	52,5%	116,6%
	Jumlah Penemuan Pendapatan Asli Daerah	274.827.889,161	1.225.965.838.477,01	450,0%

Jumlah seluruh Anggaran Regulasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Rp. 46.279.324,841

Jumlah Realisasi Anggaran Regulasi Tahun 2024 Rp. 28.382.707,201

Denpasar, 14 Oktober 2024

  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kota Denpasar

*(Signature)*  
Pembina Utama Muda

NP. 1506024.120011.010

### Pertumbuhan Perolehan Kinerja

Triwulan III Tahun 2024

#### Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

##### Indikator Kinerja: Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

TARGET	45,0%
Realisasi Jumlah Penemuan Pendapatan Asli Daerah	Rp. 1.225.965.838.477,01
Realisasi Pendapatan Daerah	Rp. 2.323.446.958.084,01

##### Perhitungan

$$\frac{\text{Realisasi Jumlah Penemuan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$$

$$\frac{1.225.965.838.477,01}{2.323.446.958.084,01} \times 100 = 52,5\%$$

##### Capaian Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan

$$\frac{\text{Realisasi Kontribusi PAD terhadap Pendapatan}}{\text{Target Kontribusi PAD terhadap Pendapatan}} \times 100$$

$$\frac{52,5\%}{45,0\%} \times 100 = 116,6\%$$

##### Indikator Kinerja: Jumlah Penemuan Pendapatan Asli Daerah

TARGET	Rp. 274.827.889,161
Realisasi	Rp. 1.225.965.838.477,01

##### Perhitungan

$$\frac{\text{Realisasi Jumlah Penemuan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Jumlah Penemuan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100$$

$$\frac{1.225.965.838.477,01}{274.827.889,161} \times 100 = 450,0\%$$

## Triwulan IV

### REKAPITULASI KINERJA

OPD : Badan Pendapatan Daerah  
Tahun : Triwulan IV Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	47,18%	52,4%	111,04%
	Jumlah Penemuan Pendapatan Asli Daerah	1.311.387.264,394	1.441.621.203.962,75	129,04%

Jumlah seluruh Anggaran Regulasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Rp. 46.279.324,841

Jumlah Realisasi Anggaran Regulasi Tahun 2024 Rp. 34.750.932,819

Denpasar, 27 Desember 2024

  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kota Denpasar

*(Signature)*  
Pembina Utama Muda

NP. 1506024.120011.010

### Pertumbuhan Perolehan Kinerja

Triwulan IV Tahun 2024

#### Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

##### Indikator Kinerja: Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

TARGET	47,18%
Realisasi Jumlah Penemuan Pendapatan Asli Daerah	Rp. 1.441.621.203.962,75
Realisasi Pendapatan Daerah	Rp. 2.750.965.838.477,01

##### Perhitungan

$$\frac{\text{Realisasi Jumlah Penemuan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$$

$$\frac{1.441.621.203.962,75}{2.750.965.838.477,01} \times 100 = 52,4\%$$

##### Capaian Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan

$$\frac{\text{Realisasi Kontribusi PAD terhadap Pendapatan}}{\text{Target Kontribusi PAD terhadap Pendapatan}} \times 100$$

$$\frac{52,4\%}{47,18\%} \times 100 = 111,04\%$$

##### Indikator Kinerja: Jumlah Penemuan Pendapatan Asli Daerah

TARGET	Rp. 1.311.387.264,394
Realisasi	Rp. 1.441.621.203.962,75

##### Perhitungan

$$\frac{\text{Realisasi Jumlah Penemuan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Jumlah Penemuan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100$$

$$\frac{1.441.621.203.962,75}{1.311.387.264,394} \times 100 = 129,04\%$$